



BPKPD



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**LAKIP
2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan sebagai perwujudan dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, kontribusi masukan dan saran sangat di harapkan guna peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang. Terucap terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Benteng, 10 Februari 2026

KEPALA BADAN,



NURSAL IKHSAN, S.E. M.Ak.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19830525 200604 1 016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang

dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan;
4. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
7. Pengoordinasian penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya;
8. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

9. Pelaksanaan sistem akuntansi daerah;
10. Pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
11. Pengoordinasian pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dikelola oleh SKPD lainnya; dan
12. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya 100% yaitu indikator kinerja nilai Lakip, indikator kinerja laporan keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi (SAP) dan indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dan ada 1 (satu) indikator kinerja yang pencapaiannya di bawah 100% yaitu indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk indikator kinerja nilai Lakip dan indikator kinerja opini BPK dinilai berdasarkan tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6
D. Isu-isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis	21
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Rencana Kerja Tahunan	28
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	159
A. Pengukuran Kinerja	161
B. Analisis Capaian Kinerja	165
C. Realisasi Keuangan	191
BAB IV PENUTUP	208
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2026	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	23
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	26
Tabel 2.3 : Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	27
Tabel 3.1 : Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target	162
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Utama	163
Tabel 3.3 : Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	165
Tabel 3.4 : Indikator Kinerja Utama (IKU 2)	170
Tabel 3.5 : Target dan Realisasi PAD Tahun 2025	173
Tabel 3.6 : Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah	174
Tabel 3.7 : Target dan Realisasi Hasil Retribusi	177
Tabel 3.8 : Target dan Realisasi Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	179
Tabel 3.9 : Target dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah	180
Tabel 3.10 : Indikator Kinerja Utama (IKU 3)	182
Tabel 3.11 : Indikator Kinerja Utama (IKU 4)	185
Tabel 3.12 : Indikator Kinerja Utama (IKU 5)	189

Tabel 3.13 : Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	191
Tabel 3.14 : Penyerapan terhadap pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah per Program Tahun 2025	192
Tabel 3.15 : Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025	193
Tabel 3.16 : Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan per Sub Kegiatan Tahun 2025	193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah serta tugas pembantuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam mengimplementasikan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas

akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan realisasi kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2025 sekaligus melaksanakan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai alat kontrol dan daya dorong dalam peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sebagai *feedback* bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas juga memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 78 tentang Penilaian Kinerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan Metode “Silajara” di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasar dari kondisi tersebut maka, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdiri sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses pemerintahan dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. Evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP dikarenakan pada tahap akhir dari prosesnya akan mengindikasikan optimal atau tidaknya kinerja setiap Organisasi

Perangkat Daerah, dan akan memperlihatkan sejauh mana kemajuan instansi pemerintah dalam menerapkan kinerja yang berfokus pada hasil. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus diertanggungjawabkan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan

dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja serta monitoring dan evaluasi dari sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai *feedback* dan alat kendali atau pemacu dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

C. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan pelaksanaan tugasnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai organisasi perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam pemenuhan realisasi target kinerja dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
3. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum Fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan;

4. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;
6. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan penanganan tindak lanjut dan tuntutan ganti rugi;
7. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
8. Menyelenggarakan pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
9. Menyelenggarakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
10. Menyelenggarakan pemberian bantuan atas nama pemerintah daerah;
11. Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

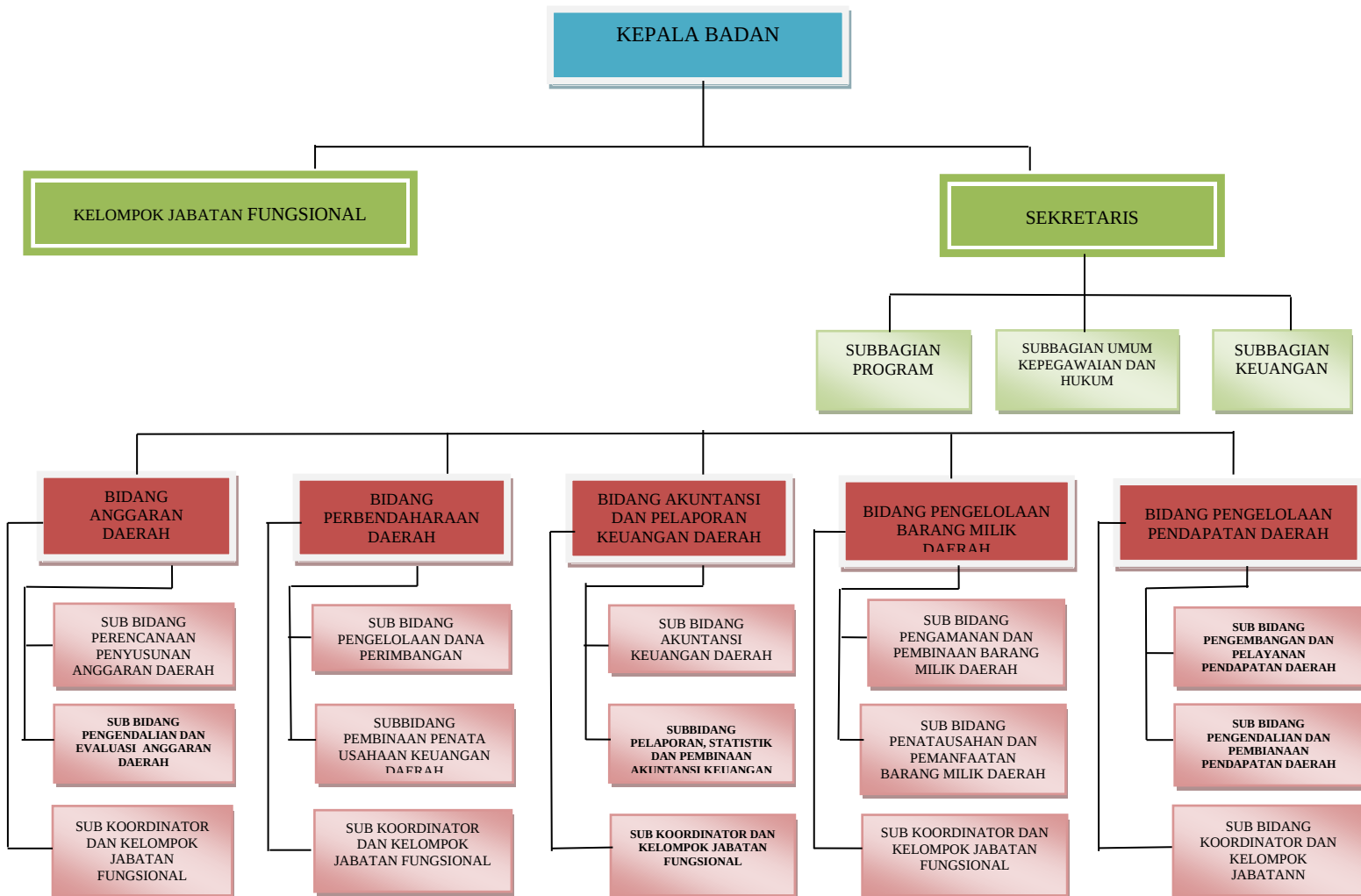
12. Mengoordinasikan dan menyeleggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
13. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

- I. Kepala Badan
- II. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub. Bagian Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 3. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari atas:
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan
 3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
- IV. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah;dan

3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
- V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
 2. Sub Bidang Pelaporan, Statistik dan Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
- VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
- VII. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
1. Sub Bidang Pengembangan & Pelayanan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian & Pembinaan Pendapatan Daerah;
 3. JabFung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.



4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah didukung oleh 52 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2.

a. Berdasarkan golongan ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	6
4.	Penata Tingkat I (III/d)	13
5.	Penata (III/c)	9
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4
7.	Penata Muda (III/a)	14
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur (II/b)	0
11.	Ahli Pertama / IX	3
JUMLAH		52

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	17
2.	S1	23
3.	D III	2
4.	SMA	10
JUMLAH		52

c. Berdasarkan jenis kelamin

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	5	2
2.	III	16	24
3.	II	1	1
4.	IX	1	2
JUMLAH		23	29

d. Berdasarkan jumlah pejabat Struktural

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	II	1	0
2.	IIIa	1	0
3.	IIIb	3	2
4.	IVa	7	5
JUMLAH		12	7

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan persentase 76,92%. Diploma III

sebanyak 2 (dua) orang dengan persentase sebesar 3,84% dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan persentase 19,23%. Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 mempunyai sumber daya manusia yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 19 (sembilan belas) orang Pejabat Struktural. Pejabat struktural ini di tuntut untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dalam mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Penpapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi di masing-masing Bidang sebagai unit kerja dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong

dari BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lembaga teknis daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan rencana anggaran daerah yaitu kompetensi SDM penyusun rencana anggaran masing-masing perangkat daerah masih rendah;
2. Belum optimalnya pengelolaan perbendaharaan daerah yaitu pengelola perbendaharaan yang terampil masih kurang;
3. Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu kualitas pengelolaan keuangan sangat mempengaruhi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;
4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah yaitu pengelola barang milik daerah yang faham manajemen aset masih kurang; dan
5. Belum optimalnya pendapatan daerah yaitu pelayanan pajak dan retribusi daerah masih rendah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 berpedoman atau menbacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengatur mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja serta pelaporan capaian kinerja.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan perencanaan kinerja yan

selaras dengan visi, misi serta tujuan strategis pemerintah daerah. Perencanaan kinerja diwujudkan kedalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta di gunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah. Melalui implementasi perencanaan kinerja yang sistematis dan berbasis hasil, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, manajemen aset yang baik, optimalisasi pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merumuskan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau kemungkinan timbul.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yakni **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**. Yang dijabarkan dalam 3 (tiga) misi yaitu pada Misi Kesatu *Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan* dengan 4 (empat) sasaran yang ingin di capai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan;
3. Meningkatnya Nilai SAKIP OPD; dan
4. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut di atas digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

TUJUAN		SASARAN	
NO	URAIAN	NO	URAIAN
1.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi BPKPD	2.1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan
		2.2	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD
		2.3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Adapun rumusan strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan sistem kelembagaan dan

pengawasan, meningkatkan inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;

2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi kinerja/hasil;
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan strategi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diambil beberapa arah kebijakan yang diterapkan antara lain :

1. Penginternalisasian pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas;
2. Peningkatan sarana dan prasarana, kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;

4. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah; dan
5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU) Adalah sebagai tolok ukur pencapaian strategis OPD, sebagai dasar pengambilan Keputusan oleh kepala OPD berbasis data dan berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban OPD kepada Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memuat informasi tentang tugas, fungsi, kinerja utama, indikator kinerja utama disertai penjelasan dan sumber data yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke -						Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	n/a	65,323	72,015	73,943	77,642	79,325	79,325
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,85%	8,25%	5,48%	5,69%	3,46%	1,52%	1,52%
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi BPKPD		Indeks Reformasi Birokrasi BPKPD	C	CC	CC	B	B	A	A
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	66,68	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00	85,00
		Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	BB	BB	A	A

		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah	Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
--	--	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

C. Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Nilai LAKIP perangkat daerah	CC
2.	Meningkatnya pelaksanaan APBD setiap tahun yang efektif	2.1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Selayar	Tepat Waktu
3.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	3.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
4.	Tercapainya target pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah	4.1	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan unit kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian kinerja ini menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan strategis organisasi, rencana kerja tahunan, serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam dokumen tersebut ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing unit kerja sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja instansi selama tahun berjalan. Melalui perjanjian kinerja yang jelas dan terukur, pimpinan instansi dapat melakukan pemantauan, pengendalian, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja menjadi acuan utama dalam menilai tingkat pencapaian kinerja instansi. Realisasi capaian indikator kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahun 2025, diharapkan seluruh perangkat organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal,

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perjanjian kinerja ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh instansi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai eselon II, eselon III, dan eselon IV sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

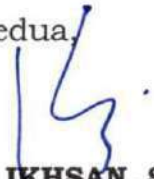
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

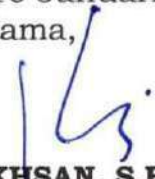
Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Keluaran	Hasil
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				85.000.000		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya	Januari s.d Desember	20.000.000	Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2 Penginputan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran dalam Aplikasi MANCA'				
			3 Reformasi Birokrasi (PMPRB)				
			4 Pengarustamaan Gender (PUG)				
			5 Penyusunan Perjanjian Kinerja				
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan LPPD	Januari s.d Desember	15.000.000	Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Penyusunan LKPJ Penyusunan LAKIP	Januari s.d Desember	10.000.000	Laporan	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	ADMINISTRASI KEUANGAN	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Januari s.d Desember	7.028.339.476 6.963.339.476	Dokumen	Dokumen Penerimaan Gaji dan Tunjangan

		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Januari s.d Desember	15.000.000	Dokumen	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Januari s.d Desember	15.000.000	Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Januari s.d Desember	15.000.000	Laporan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Januari s.d Desember	60.000.000	Jumlah Pegawai	Tercapainya Jumlah Pengadaan Pakaian Pegawai
					75.000.000		

		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Laporan Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Januari s.d Desember	15.000.000	Jumlah Pegawai	Tercapainya Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari s.d Desember	253.597.300	Paket	Tercapainya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Laporan Paket Bahan Logistik Kantor	Januari s.d Desember	55.000.000	Paket	Tercapainya Persentase Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyusunan Laporan Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Januari s.d Desember	19.500.000	Paket	Tercapainya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Januari s.d Desember	5.520.000	Dokumen	Tercapainya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyusunan Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Januari s.d Desember	79.998.000	Laporan	Tercapainya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
					613.715.300		

		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari s.d Desember	200.100.000	Laporan	Tercapainya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pengadaan Mebel 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyusunan Laporan Pengadaan Pengadaan Mebel Penyusunan Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari s.d Desember Januari s.d Desember Januari s.d Desember	411.500.220 60.534.000 16.250.000 334.716.220	Unit Unit Unit	Tercapainya Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tercapainya Jumlah Pengadaan Tercapainya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Januari s.d Desember Januari s.d Desember	5.485.044.168 2.710.231.289 2.774.812.879	Laporan Laporan	Tercapainya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Tercapainya Jumlah Orang dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
7	BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				399.739.812		

		1	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Januari s.d Desember	249.800.000	Jumlah Kendaraan Dinas	Tercapainya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari s.d Desember	49.940.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Januari s.d Desember	99.999.812	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Plt. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

SEKRETARIS BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyusunan Renja	Rp 20.000.000													
2	Penginputan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran dalam Aplikasi MANCA'	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penginputan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran dalam Aplikasi MANCA'														
3	Reformasi Birokrasi (PMPRB)	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Reformasi Birokrasi (PMPRB)														
4	Pengarustamaan Gender (PUG)	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarustamaan Gender (PUG)														
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan Perjanjian Kinerja														
6	Penyusunan Dokumen RKA	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas	Rp 10.000.000													
8	Dokumen Perubahan RKA	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas	Rp 10.000.000													
10	Penyusunan Dokumen DPA	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan Dokumen DPA	Rp 10.000.000													
11	Dokumen Perubahan DPA	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Dokumen Perubahan DPA	Rp 10.000.000													

12	Penyusunan LPPD	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan LPPD dan LKPJ	Rp	15.000.000
13	Penyusunan LKPJ	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan LKPJ		
14	Penyusunan LAKIP	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan LAKIP	Rp	10.000.000
15	Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Rp	6.963.339,476
16	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Rp	15.000.000
17	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	10.000.000
18	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	15.000.000
19	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	mantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp	10.000.000

31	Penyusunan Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	49.940.000														
32	Penyusunan Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Rp	99.999.812														
total			Rp	14.098.338.976														

Pit. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

SEKRETARIS BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RITAWATI, S.S., M.M.**
Jabatan : Kasubag. Program BPKPD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Pihak Pertama,

RITAWATI, S.S., M.M.

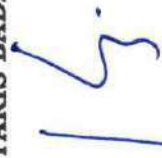
Pangkat : Penata TK.I
NIP. 19831229 201101 2 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Keluaran	Hasil
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya 2 Penginputan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran dalam Aplikasi MANCA' 3 Reformasi Birokrasi (PMPRB) 4 Pengarustamaan Gender (PUG) 5 Penyusunan Perjanjian Kinerja	Januari s.d Desember	85.000.000 20.000.000	Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan LPPD	Januari s.d Desember	15.000.000	Laporan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Penyusunan LKPJ Penyusunan LAKIP	Januari s.d Desember	10.000.000	Laporan	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEKRETARIS BADAN



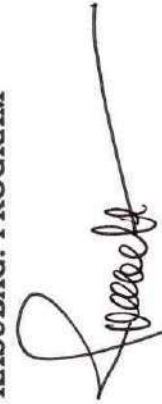
NURSAI IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

Bentang, 10 Januari 2025

KASUBAG. PROGRAM



RITAWATI, S.S., M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19831229 201101 2 013

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KASUBAG. PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Rencana Strategis dan Revisinya	1 Menyusun SK Tim Rencana Strategis	Rp 5.000.000													
		2 Melaksanakan Rapat Renstra														
		3 Menyusun Rencana Strategis berdasarkan hasil Rapat														
		4 Melakukan Asistensi pada Bappelitbangda														
		5 Revisi Rencana Strategis														
		6 Penandatanganan Rencana Strategis														
	Rencana Kerja dan Perubahannya	1 Menyusun SK Tim Rencana Kerja	Rp 2.000.000													
		2 Menyusun Rencana Kerja (Renja)														
		3 Melakukan Asistensi di Bappelitbangda														
		4 Perbaikan Hasil Asistensi														
		5 Penandatanganan Renstra														
	Penginputan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semesteran dalam Aplikasi MANCA	1 Menyusun SK Tim / Operator Aplikasi MANCA	Rp 4.000.000													
		2 Menginput Realisasi Anggaran Berdasarkan SPJ Fungsional														
	Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 Menyusun SK Tim RB	Rp 2.000.000													
		2 Melaksanakan Rapat														
		3 Mengisi Formulir Evaluasi PMPRB														
		4 Revisi oleh Tim RB pada Ida														
		5 Revisi Formulir Evaluasi PMRB														
		6 Penandatanganan Laporan Hasil Evaluasi PMRB														
	Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Menyusun SK Tim PUG	Rp 2.000.000													
		2 Menyusun SK Tim Focal Point														
		3 Menyusun SK Tim Kelompok Kerja PUG														
		4 Menyusun SK Tim Fasilitator Internal Pelaksana PPRG														
		4 Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Responsive Gender (PRG)														

		5	Mengupload Dokumen-Dokumen Kelengkapan LAKIP pada Aplikasi e-SAKIP															
		6	Reviu LAKIP oleh Inspektorat Daerah															

SEKRETARIS BADAN



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

KASUBAG. PROGRAM



RITAWATI, S.Si, M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19831229 201101 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ISWADI, S.M.**
Jabatan : Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum BPKPD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

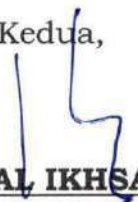
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Pihak Pertama,


MUHAMMAD ISWADI, S.M.
Pangkat : Penata
NIP. 19771021 200701 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Keluaran	Hasil
1	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	Januari s.d Desember	75.000.000	Jumlah Pegawai	Tercapainya Jumlah Pengadaan Pakaian Pegawai
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Laporan Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Januari s.d Desember	15.000.000	Jumlah Pegawai	Tercapainya Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
2	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyusunan Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Januari s.d Desember	613.715.300	Paket	Tercapainya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyusunan Laporan Paket Bahan Logistik Kantor	Januari s.d Desember	55.000.000	Paket	Tercapainya Persentase Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyusunan Laporan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Januari s.d Desember	19.500.000	Paket	Tercapainya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Januari s.d Desember	5.520.000	Dokumen	Tercapainya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyusunan Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Januari s.d Desember	79.998.000	Laporan	Tercapainya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Januari s.d Desember	200.100.000	Laporan	Tercapainya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyusunan Laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Januari s.d Desember	411.500.220	Unit	Tercapainya Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
	2	Pengadaan Mebel	Penyusunan Laporan Pengadaan Pengadaan Mebel	Januari s.d Desember	16.250.000	Unit	Tercapainya Jumlah Pengadaan Mebel
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari s.d Desember	334.716.220	Unit	Tercapainya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Januari s.d Desember	5.485.044.168	Laporan	Tercapainya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diselesaikan
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Januari s.d Desember	2.774.812.879	Laporan	Tercapainya Jumlah Orang dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Januari s.d Desember	399.739.812	Jumlah Kendaraan Dinas	Tercapainya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pejaknya

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Januari s.d Desember	49.940.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyusunan Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Januari s.d Desember	99.999.812	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

SEKRETARIS BADAN



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIN & HUKUM



MUHAMMAD ISWADI, S.M.

Pangkat : Penata

NIP. 19771021 200701 1 018

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas	1 Membuat dokumen persiapan Pengadaan	Rp60.000.000													
			2 Diajukan ke Barjas (Pejabat Pengadaan)														
			3 Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga dengan Penyedia														
			4 setelah selesai proses negosiasi Surat Pesanan diterbitkan dan dikirim ke PPK														
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Penyusunan Laporan Jumlah Pegawai yang akan mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 PPK menyetujui Surat Pesanan selanjutnya dikirim ke Penyedia														
			6 Barang dikirim Penyedia Sesuai Surat Pesanan														
			7 Barang diterima SKPD														
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Penyusunan Laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Melaksanakan konsultasi terkait jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp15.000.000													
			2 Membuat usul pegawai yang akan mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Penginapan di Aplikasi SIRUP Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Penginapan di Aplikasi SIRUP Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp253.597.300													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyusunan Laporan Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Menyediakan Pembayaran Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	Rp99.999.812														
					Rp6.984.999.500														

SEKRETARIS BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN & HUKUM


MUHAMMAD ISWADI, S.M
Pangkat : Penata
NIP. 19771021 200701 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WINARNI SURUNG, S.Sos., M.M.**
Jabatan : Kasubag. Keuangan BPKPD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

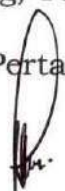
Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Pihak Pertama,

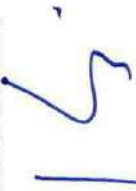

WINARNI SURUNG, S.Sos., M.M.
Pangkat : Penata TK.I
NIP. 19780214 200903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sub Kegiatan	Indikator	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Keluaran	Hasil
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Januari s.d Desember	7.028.339.476 6.963.339.476	Dokumen	Dokumen Penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Januari s.d Desember	15.000.000	Dokumen	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Januari s.d Mei	15.000.000	Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Januari s.d Desember	10.000.000	Dokumen	Dokumen Bahan Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Januari s.d Desember	15.000.000	Laporan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
---	--	----------------------	------------	---------	---

SEKRETARIS BADAN



NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

KASUBAG. KEUANGAN



WINARNI SURUNG, S.Sos., M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19780214 200903 2 001

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN											
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 6.963.339.476												
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			1 Penerbitan Ampra Gaji													
			2 Pembuatan SPP dan SPM Gaji													
			3 Verifikasi dokumen pencairan oleh PPK													
			4 Validasi dokumen													
			5 Penerbitan Ampra TPP													
			6 Pembuatan Daftar TTP													
			7 Pembuatan SPP dan SPM TPP													
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Verifikasi dokumen pencairan oleh PPK	Rp 15.000.000												
			9 Validasi dokumen													
			1 Penyusunan SK Tim Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			1 Melakukan Verifikasi dokumen laporan keuangan SKPD													
			2 Validasi dokumen laporan keuangan SKPD													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi dan Penyusunan Kegiatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			1 Verifikasi dokumen bahan Laporan Keuangan SKPD													
			2 Rekonsiliasi penyusunan Laporan Keuangan													
			3 Menjurnal dokumen Laporan Keuangan SKPD													
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Koordinasi dengan Bidang Akuntansi	Rp 10.000.000												
			5 Tersedianya Laporan Keuangan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
4	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 10.000.000												
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			1 Penyusunan SK Tim Koordinasi Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan													



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR SOFYANSYAH, S.STP.,M.A.P.**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

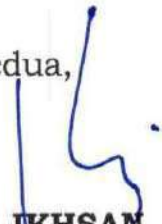
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

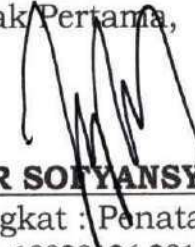
Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,


NUR SOFYANSYAH, S.STP., M.A.P.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19920126 201206 1 001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Januari s.d. Desember	Rp 32.900.000	Dokumen	Dokumen KUA dan PPAS
		2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Januari s.d. Desember	Rp 32.900.000	Dokumen	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	3 Penyusunan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Dokumen	Dokumen RKA-SKPD
		4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	4 Penyusunan Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5 Penyusunan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Dokumen	Dokumen DPA-SKPD
		6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	6 Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Dokumen	Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Januari s.d. Desember	Rp 183.100.000	Dokumen	Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Januari s.d. Desember	Rp 183.100.000	Dokumen	Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	9	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Januari s.d. Desember	Rp 30.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran
		10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 30.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	11	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran
		1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Januari s.d. Desember	Rp 129.393.489.000	Dokumen	Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Januari s.d. Desember	Rp 3.000.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Januari s.d. Desember	Rp 4.055.928.500	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Bonteng, 10 Januari 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH,

NUR SOFYANSYAH, S.STP., M.AP
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP. 19920126 201206 1 001

Pt. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2025

KEGIATAN

: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	1 Menyiapkan Perhitungan Rencana Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2024 2 Melaksanakan Rapat TAPD 3 Menyusun Rancangan KUA dan PPAS 4 Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kepada Bupati 5 Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kepada DPRD	Rp 32.900.000														
2	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Menyiapkan Perhitungan Rencana Target Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2024 2 Melaksanakan Rapat TAPD 3 Menyusun Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 4 Menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kepada Bupati 5 Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kepada DPRD	Rp 32.900.000														
3	Penyusunan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Penyediaan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 2 Melaksanakan Rapat TAPD 3 Mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah terkait Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Kepada Perangkat Daerah 4 Melaksanakan Verifikasi RKA -SKPD 5 Melaksanakan Finalisasi RKA -SKPD menjadi Rancangan APBD	Rp 20.000.000														
4	Penyusunan Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		Rp 20.000.000														

[illegible]

[illegible]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DJAMRUK PAULA LATIF, S.H.**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat Dan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.
NIP. 19680104 199601 1 001

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,


DJAMRUK PAULA LATIF, S.H.
Pangkat : Pembina
NIP. 19720720 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Januari s.d. Desember	Rp 129.393.489.000	Dokumen	Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Januari s.d. Desember	Rp 3.000.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Januari s.d. Desember	Rp 4.055.928.500	Dokumen	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Pt. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH

DJAMRUK PANCA LATIF, S.H.

Pangkat : Pembina
NIP. 19720720 201001 1 005

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2025

: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEGIATAN

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Melaksanakan Rapat Intern 2 Menyusun Jadwal Rencana Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 3 Melakukan Verifikasi Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 4 Menyusun Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Rp 129.393.489.000													
2	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Melakukan Verifikasi Dokumen Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak 2 Menyusun Laporan Realisasi Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	Rp 3.000.000.000													
3	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Menyusun Jadwal Rencana Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa 2 Melakukan Verifikasi Dokumen Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa 3 Menyusun Laporan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Rp 4.055.928.500													

Pt. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DJAMRUK PAULA LATIF, S.H.

Pangkat : Pembina
NIP. 19720720 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR AHMAD AFANDI, S.M.**
Jabatan : Kasubid Perencanaan, Penyusunan Anggaran Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NUR SOFYANSYAH, S.STP.,M.A.P.**
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


NUR SOFYANSYAH, S.STP.,M.AP
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19920126 201206 1 001

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,


NUR AHMAD AFANDI, S.M.
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19871218 201903 1 005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Januari s.d. Desember	Rp 32.900.000	Dokumen	Dokumen KUA dan PPAS
	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Januari s.d. Desember	Rp 32.900.000	Dokumen	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	3 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Januari s.d. Desember	Rp 30.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
	4 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 30.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
	5 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
ANGGARAN DAERAH,

NUR SOFYANSYAH, S.STP., M.AP
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19920126 201206 1 001

Benteng, 10 Januari 2025

KASUBID PERENCANAAN PENYUSUNAN
ANGGARAN DAERAH,

NUR AHMAD AFANDI, S.M
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19871218 201903 1 005

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	1 Menyiapkan Perhitungan Rencana Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2024 2 Melaksanakan Rapat TAPD 3 Menyusun Rancangan KUA dan PPAS 4 Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kepada Bupati 5 Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kepada DPRD	Rp 32.900.000													
2	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Menyiapkan Perhitungan Rencana Target Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA. 2024 2 Melaksanakan Rapat TAPD 3 Menyusun Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 4 Menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kepada Bupati 5 Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kepada DPRD	Rp 32.900.000													
3	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Pendapatan dengan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah 2 Menyusun dokumen/proyekti Terkait Perencanaan Pendapatan	Rp 30.000.000													
4	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Belanja dengan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah 2 Menyusun Dokumen Terkait Perencanaan Belanja Daerah	Rp 30.000.000													

5	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Pembiayaan dengan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah Serta BUMD 2 Menyusun dokumen terkait perencanaan pembiayaan	Rp 20.000.000																	
---	--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Benteng, 10 Januari 2025
**KASUBID PERENCANAAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN DAERAH,**

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 ANGGARAN DAERAH,**

NUR AHMAD AFANDI, S.M
 Pangkat : Penata Muda Tk. I
 NIP. 19871218 201903 1 005

NUR SOFTIAN SYAH, S.STP., M.AP
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP. 19920126 201206 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULFADLI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

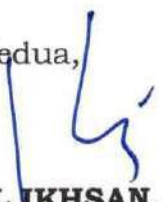
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,


ZULFADLI, S.E.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19780612 200604 1 024

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Januari s.d. Desember	Rp11.357.400	Laporan	Laporan Hasil Pengelolaan SILPA Tahun Sebelumnya
		2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2 Penerbitan SPD 3 Penerbitan SP2D	Januari s.d. Desember	Rp74.003.800	Dokumen Dokumen Dokumen	Dokumen SK Bupati Dokumen SPD Dokumen SP2D
		3 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bank	1 Koordinasi dengan Bank BPD mengenai transaksi non tunai	Januari s.d. Desember	Rp42.238.800	Dokumen	Dokumen Transaksi Non Tunai
		4 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Fasilitasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah			Kartu Kredit	Kartu Kredit OPD
			1 Perhitungan utang piutang OPD tahun berjalan			Dokumen	Dokumen Perhitungan Utang Piutang OPD Tahun Berjalan
			2 Optimalisasi Kas		Rp25.000.000	Dokumen	Dokumen Penyertaan Modal Pemda pada Bank
				Januari s.d. Desember			Dokumen SP2D
		5. Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	1 Penatausahaan Kas 2 Penatausahaan Gaji dan Tambahan Penghasilan pegawai	Januari s.d. Desember	Rp156.350.000	Dokumen Dokumen	Dokumen Daftar Gaji



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI FITRIANI, S.E.,M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

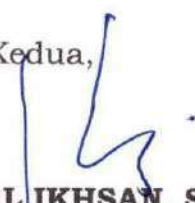
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19680104 199601 1 001

Pihak Pertama,


ANDI FITRIANI, S.E.,M.M.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19820905 200903 2 004

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
1	1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Januari s.d. Desember	Rp11.357.400	Laporan	Laporan Hasil Pengelolaan SILPA Tahun Sebelumnya
		2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 2 Penerbitan SPD 3 Penerbitan SP2D	Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember Januari s.d. Desember	Rp74.003.800	Dokumen Dokumen Dokumen	Dokumen SK Bupati Dokumen SPD Dokumen SP2D
		3 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Koordinasi dengan Bank BPD mengenai transaksi non tunai	Januari s.d. Desember	Rp34.500.000	Dokumen	Dokumen Transaksi Non Tunai
			2 Fasilitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah	Januari s.d. Desember		Kartu Kredit	Kartu Kredit OPD
		4 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Perhitungan utang piutang OPD tahun berjalan	Januari s.d. Desember	Rp30.550.000	Dokumen	Dokumen Perhitungan Utang Piutang OPD Tahun Berjalan

			2 Optimalisasi Kas	Januari s.d. Desember	Dokumen	Dokumen Penyertaan Modal Pemda pada Bank
--	--	--	--------------------	-----------------------	---------	---

Pt. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA,

ANDI FITRIANI, S.E., M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19820905 200903 2 004

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Perhitungan SILPA	1 Mengidentifikasi Nilai Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp11.357.400													
	Pengelolaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya														
2	Penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang	1 Menyusun draft SK Pejabat Pengelola Keuangan beserta lampirannya 2 Asistensi draft SK Pejabat Pengelola Keuangan pada Bagian Hukum Setda 3 Penerapan SK Pejabat Pengelola Keuangan yang ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati secara elektronik	Rp74.003.800													
	Penerbitan SPD	1 Membuat SPD masing-masing OPD Sesuai Anggaran Kasnya. Setiap Semester 2 Membuat SPD Perubahan dan Pergeseran Sesuai dengan Anggaran Perubahan														
	Penerbitan SP2D	1 Membuat SP2D berdasarkan SPM yang sudah diverifikasi oleh Kasubbid Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah 2 Melakukan Verifikasi antara Dokumen SPM dengan SP2D, Sebelum diajukan kepada BUD/Kuasa BUD														
3	Koordinasi dengan Bank BPD mengenai	1 Koordinasi Penerimaan Kas Daerah	Rp34.500.000													



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUFRI NUR, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Penatausahaan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZULFADLI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

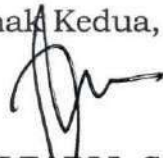
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

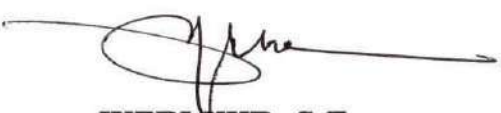
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ZULFADLI, S.E.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19780612 200604 1 024

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,


JUFRI NUR, S.E.
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19810607 200803 1 003

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	1 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Penyusunan Laporan Aliran Kas 3 Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Januari s.d Desember Januari s.d Desember Januari s.d Desember	Rp 28.000.000 Rp 12.000.000 Rp 30.318.600	Dokumen Dokumen Dokumen	Laporan Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Laporan Buku Pembantu Bank Laporan Hasil Konfirmasi NTPN
	2 Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas SKPD	Januari s.d Desember	Rp 29.756.300	Dokumen	Kertas Kerja Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi
		2 Rekonsiliasi pemungutan pajak SKPD melalui mekanisme GU/TU/LS	Januari s.d Desember	Rp 60.000.000	Dokumen	Kertas Kerja Rekonsiliasi, Kertas Kerja Konfirmasi NTPN
	3 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Verifikasi dokumen pencairan SKPD	Januari s.d Desember	Rp 45.975.100	Dokumen	Register dan Nota Konfirmasi

	2	Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Januari s.d Desember	Rp 100.000.000	Dokumen	Laporan Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
				Rp 306.050.000		

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAN DAERAH,


ZULFADLI, S.E.
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP. 19780612 200604 1 024

Beuteng, 10 Januari 2025

**KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH**


JUFRINUR, S.E.
 Pangkat : Penata
 NIP. 198106072008031003

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Membuat Daftar penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Rp 28.000.000													
		2 Melakukan Koordinasi dengan Bank SulSelbar mengenai Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
		3 Membuat Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
		4 Berkoordinasi dengan BPKD Provinsi Sulawesi Selatan dan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan terkait Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
	Penyusunan Laporan Aliran Kas	1 Melakukan pengecekan transaksi pada aplikasi keuangan	Rp 12.000.000													
		2 Melakukan koordinasi dengan Kasda dan Bidang Akuntansi														
		3 Mencetak Laporan Aliran Kas pada Aplikasi Keuangan														
		4 Berkoordinasi dengan BPKD Provinsi Sulawesi Selatan terkait Penyusunan Laporan Aliran Kas														
	Penyusunan Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	1 Mengecek Penginputan pajak SKPD yang telah disetor ke kas negara pada aplikasi keuangan	Rp 30.318.600													
		2 Melakukan Koordinasi dengan Bank SulSelbar terkait pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)														
		3 Berkoordinasi dengan KPPN Benteng dan Kantor Pajak Pratama Bulukumba terkait konfirmasi NTPN														
		4 Menyusun Laporan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)														



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **E M M A, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZULFADLI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

ZULFADLI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19780612 200604 1 024

Pihak Pertama,

E M M A, S.E.

Pangkat : Penata

NIP. 19780518 201410 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Penatausahaan Kas	Januari s.d. Desember	Rp156.350.000	Dokumen	Dokumen SP2D
		2 Penatausahaan Gaji dan Tambahan Penghasilan pegawai			Dokumen	Dokumen Daftar Gaji
	2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Pembiayaan Daerah	Januari s.d. Desember	Rp45.000.000	Dokumen	Dokumen rekapitulasi potongan dan berita acara rekonsiliasi
	3. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Koordinasi Pengelolaan DAU/DAK/DANA TRANSFER	Januari s.d. Desember	Rp45.000.000	Laporan	laporan belanja pegawai dan dokumen persyaratan penyaluran dana transfer

Benteng, 10 Januari 2025

**KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN
DANA PERIMBANGAN,**

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAN DAERAH,



E M N A, S.E.

Pangkat : Penata

NIP. 19780518 201410 2 001



ZULFADLI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19780612 200604 1 024

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

TAHUN 2025

[illegible]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BASNIATY, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

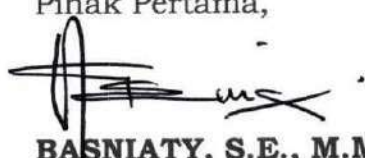
Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Pihak Pertama,


BASNIATY, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
NIP. 19790916 200502 2 008

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
1.	1 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	1 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	1 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	Januari s.d. Desember	Rp 75.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN HASIL KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH
	2 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	2 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO	1 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	Januari s.d. Desember	Rp 50.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DATA DAN DOKUMEN HASIL REKONSILIASI
	3 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	3 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	1 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN	Januari s.d. Desember	Rp 50.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN
	4 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	4 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERKONSOLIDASI	Januari s.d. Desember	Rp 30.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DATA DAN DOKUMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
	5 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	5 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	1 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN	Januari s.d. Desember	#####	RANPERDA DAN RANPERBUP	PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBD
	6 PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	6 PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1 PENYUSUNAN DOKUMEN TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	DOKUMEN	DOKUMEN TANGGAPAN/ TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

		7	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAAN DAERAH	1	PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAAN DAERAH	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAAN
		8	PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1	PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
		9	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	1	PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
		10	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	1	PELATIHAN/BIMTEK AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000,00	JUMLAH YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK	PENERAPAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN
		11	PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA	1	PELATIHAN/BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000,00	JUMLAH YANG MENGIKUTI PELATIHAN/BIMTEK	PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
		12	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1	PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DOKUMEN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PIL. KEPALA BADAN


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Bentang, 10 Januari 2025
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH,


BASMIATY, SE., M.M.
Pangkat : Pembina
NIP. 19790916 200502 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SHUGIRAWATI, S.E.**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E.,M.Ak.,M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,


SHUGIRAWATI, S.E.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19800220 200903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 75.000.000	Laporan	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran kas daerah
		2 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Pelatihan/Bimtek Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Jumlah yang mengikuti bimtek	Penerapan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota
		3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1 Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten	Januari s.d. Desember	Rp 20.000.000	Jumlah yang mengikuti bimtek	Penerapan Pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota
		4 Identifikasi dan Inventarisasi Data Laporan Keuangan Daerah	1 Penyusunan Laporan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah	Januari s.d. Desember		Laporan	Laporan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah
		5 Pengolahan dan Analisis Data Laporan Keuangan Daerah	1 Penyusunan Laporan dan Analisis data terkait Laporan Keuangan Daerah	Januari s.d. Desember		Laporan	Laporan dan Analisis data terkait Laporan Keuangan Daerah
		6 Rekomendasi Laporan Keuangan Daerah	Penyusunan rekomendasi mengenai Laporan Keuangan Daerah	Januari s.d. Desember		Laporan	rekomendasi mengenai Laporan Keuangan Daerah
		7 Pemantauan dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	1 Penyusunan Laporan Pemantauan dan evaluasi terkait Laporan Keuangan Daerah	Januari s.d. Desember		Laporan	Laporan Pemantauan dan evaluasi terkait Laporan Keuangan Daerah

PK. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Bonteng, 10 Januari 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

SHUGIRAWATI, S.E
Pangkat : Penata TK.I
NIP. 19800220 200903 2 002

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Melaksanakan Rapat Intern 2 Menyusun SK Tim Pelaksana Kegiatan 3 Mengumpulkan data penerimaan dan pengeluaran kas daerah 4 Melakukan Verifikasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah 5 Menyusun Laporan Realisasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Rp 75.000.000													
2	Pelatihan/Bimtek Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Menyusun SK Tim Pelaksana Kegiatan 2 Mengadakan pelatihan/bimtek Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah kabupaten/kota 3 Menyusun Laporan kegiatan tentang pelatihan/bimtek Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp 20.000.000													
3	Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten	1 Menyusun SK Tim Pelaksana Kegiatan 2 Mengadakan pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten	Rp 20.000.000													



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR MAYANI S.E.,M.Si.**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BASNIATY, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BASNIATY, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
NIP. 19790916 200502 2 008

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,

NUR MAYANI S.E.,M.Si.
Pangkat : Penata
NIP. 19820721 200903 2 005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
1.	1 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	1 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN	Januari s.d. Desember	Rp 50.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULAN DAN SEMESTERAN
2	2 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERKONSOLIDASI	Januari s.d. Desember	Rp 30.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DATA DAN DOKUMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG
3	3 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	1 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN	Januari s.d. Desember	Rp 280.000.000,00	RANPERDA DAN RANPERBUP	PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBD
4	4 PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1 PENYUSUNAN DOKUMEN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	DOKUMEN	DOKUMEN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
5	5 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	1 PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Bentang, 10 Januari 2025
KEPALA SUB.BIDANG AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH,



NUR MAYANINGSIH, M.Si
Pangkat : Penata
NIP. 19820721 200903 2 005

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH,



BASMIATY, S.E., M.M
Pangkat : Pembina
NIP. 19790916 200502 2 008

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

[illegible]

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	2.	PENGUMPULAN RUJUKAN ATAU REFERENSI BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU LITERATUR LAIN YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH																		
	3.	MENGIDENTIFIKASI AKUN-AKUN YANG MEMERLUKAN PEMILIHAN METODE YANG KHUSUS ATAS PENGAKUAN ATAU PENGUKURAN																		

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
 KEUANGAN DAERAH,


BASMIATY, S.E., M.M.
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19790916 200502 2 008

Benteng, 10 Januari 2025
 KEPALA SUB.BIDANG AKUNTANSI
 KEUANGAN DAERAH,


NUR MAWANI, S.E., M.Si
 Pangkat : Penata
 NIP. 19820721 200903 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUMRIATI, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan Statistik dan
Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BASNIATY, S.E., M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BASNIATY, S.E., M.M.

Pangkat : Pembina

NIP. 19790916 200502 2 008

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,

JUMRIATI, S.E., M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19770925 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
1.	1 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO	1 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	Januari s.d. Desember	Rp 50.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DATA DAN DOKUMEN HASIL REKONSILIASI
		2 PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1 PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
		3 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1 PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	DATA DAN DOKUMEN	DOKUMEN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
		4 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAAN DAERAH	1 PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAAN DAERAH	Januari s.d. Desember	Rp 25.000.000,00	LAPORAN	LAPORAN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH,

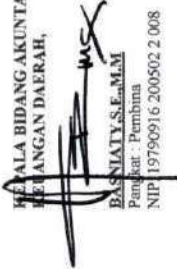

BASNATIY, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
NIP. 19790916 200502 2 008

Benteng, 10 Januari 2025
KEPALA SUB. BIDANG PELAPORAN, STATISTIK
DAN PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,


JUMRIATILIS, E., M.M.
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19770925 201001 2 002

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO, DAN BEBAN	1. MEMVERIFIKASI DATA DAN BAHAN REKONSILIASI SKPD	Rp 50.000.000,00													
		2. MEMBUAT KERTAS KERJA PENDAPATAN, BELANJA, ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN														
		3. MEMBUAT BERITA ACARA REKONSILIASI														
2.	PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	1. MEMVERIFIKASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	Rp 25.000.000,00													
		2. MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH														
		3. MENGANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH														
3.	PENYUSUNAN DOKUMEN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1. MEMVERIFIKASI DOKUMEN TERKAIT PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 25.000.000,00													
		2. MENYUSUN DRAF STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH														
		1. MENYUSUN SK TIM PELAKSANA KEGIATAN	Rp 25.000.000,00													
4.	PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	2. MENGUMPULKAN DOKUMEN TERKAIT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH														
		3. MEMVERIFIKASI DOKUMEN TERKAIT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN ATAU TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH														
		4. MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH KEPihak TERKAIT DAN BPK														

**KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH,**

BASRIATY S.E., M.M.
Pangkat : Pembina
NIP 19790916 200502 2 008

Bontang, 10 Januari 2025
**KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN, STATISTIK
DAN PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,**

JUMRIATI S.E., M.M.
Pangkat : Penata Tk I
NIP 19770925 201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI ARWIS, S.T.,M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Pihak Pertama,

ANDI ARWIS, S.T.,M.MSi.

Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Penyusunan Standar Harga	Januari s/d Desember	Rp77.641.000	Dokumen	Jumlah Standar harga
		2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp11.980.000	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
		3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp22.630.100	Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
		4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp87.096.800	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp469.503.700	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
		6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp28.254.000	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp32.056.400	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp14.486.000	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp27.920.000	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Januari s/d Desember	Rp28.432.000	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
				Rp800.000.000		

PIR. KEPALA BADAN BPKPD,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.A.K.
Pangkat : Pembina Tk.IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,

ANDI AFWIS, S.T., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SPT	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Standar Harga	1 Penyusunan Dokumen Standar harga	1 Pembentukan Tim Kerja 2 Rapat koordinasi dengan OPD terkait 3 Membuat analisa harga 4 Survey Harga 5 Menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga 6 Penetapan Peraturan Bupati 8 Review Peraturan Bupati untuk Semester II	Rp77.641.000													
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Pembentukan Tim Kerja 2 Membuat surat ke OPD untuk mengajukan usul perencanaan barang 4 Menyusun draft RKBMD 5 Penetapan SK RKBMD	Rp11.980.000													
3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Pembentukan Tim 2 Membuat rekapitulasi barang milik daerah yang ada di seluruh OPD 3 Membuat Laporan Barang Milik Daerah	Rp22.630.100													
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	4 Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Pembentukan Tim 2 Membuat surat permintaan KIB ke OPD 3 Membuat rekapitulasi BMD 4 Melakukan cek fisik BMD ke OPD 5 Mensinkronkan barang yang ada di KIB dan yang ada di lapangan	Rp37.096.800													

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	8 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi	1 Pembentukan Tim 2 Membuat surat permintaan KIB dan data pengadaan tahun berjalan di OPD	Rp14.486.000													
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah	9 Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Pembentukan Tim 2 Melaksanakan koordinasi pencatatan BMD 3 Membuat berita acara verifikasi pencatatan BMD	Rp27.920.000													
10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	10 Penyusunan Dokumen Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Pembentukan Tim pelaksana kegiatan 2 Rapat internal Tim 3 Membuat surat permintaan nara sumber ke BPKPD Provinsi 4 Membuat undangan pelatihan ke semua OPD 5 Pelaksanaan pelatihan pengelolaan BMD	Rp28.432.000													
TOTAL				800.000.000													

Pt. KEPALA BADAN BPKPD,

[Signature]

NURSAL IKHSAN, S.E., M.A.K.
Pangkat : Pembina Tk.IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,

[Signature]

ANDI ARWIS, S.T., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MULIANTI, S.E.**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,

MULIANTI, S.E.

Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19810717 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025

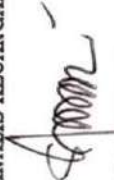
NO KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Dokumen Standar harga	Januari s/d Desember	Rp77.641.000	Dokumen	Jumlah Standar harga
		2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp11.980.000	Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
		3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Januari s/d Desember	Rp22.630.100	Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
								Rp112.251.100

Pt. KEPALA BADAN BPKPD,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.A.K.
Pangkat : Pembina Tk.IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA


MULIANTI, SE
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 198101172010012003

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	RENCANA AKSI	Tugas Fungsional	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	1 Pembentukan Tim Kerja 2 Rapat koordinasi dengan OPD terkait 3 Membuat analisa harga 4 Survey Harga	1 Menyurati OPD guna mendapatkan unsur teknis yang membidangi 2 Menyusun SK Tim Penyusunan SSH 3 Menyusun daftar kelompok barang yang disurvei 4 Mendistribusikan daftar suvey barang kepada objek yang menjual barang-barang yang disurvei minimal 3 (tiga) daftar masing-masing kelompok barang pada objek yang berbeda 5 Mengumpulkan daftar suvey dan menginput data berdasarkan harga survey 6 Memutuskan harga pasar yang digunakan dengan menambahkan keuntungan, pajak dan inflasi 7 Membuat SK Penetapan Standar Harga yang ditanda tangani oleh Bupati.	1. Melakukan Telaah Standar Analisa Belanja 2. Melakukan Telaah Standar Satuan Harga	Rp77.641.000													
2	Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Pembentukan Tim Kerja 2 Membuat surat ke OPD untuk mengajukan usul perencanaan barang 3 Memverifikasi usul RKBMD dari OPD 4 Menyusun draft RKBMD 5 Penetapan SK RKBMD	1 Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2 Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang kemudian disampaikan kepada Pengelola EMD melalui pembantu pengelola untuk diteliti dan disusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) 3 Semua data OPD di input/direkapitulasi oleh Pengelola EMD dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati 4 Membuat SK penetapan RKBMD dan RKPMD	Melakukan Telaah tentang Standar Kebutuhan barang/jasa yang diperlukan	Rp11.980.000													

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	RENCANA AKSI	Tugas Fungsional	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SPT	OKT	NOV	DES	
3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Pembentukan Tim 2 Membuat rekapitulasi barang milik daerah yang ada di seluruh OPD 3 Membuat Laporan Barang Milik Daerah	1 Menyusun dan Membuat SK Tim Penyusunan Laporan BMD 2 Menyurati SKPD untuk mengusulkan barang-barang yang akan ditetapkan status penggunaannya 3 Penyusunan SK Penetapan Status 4 Penetapan status BMD 5 Penyusunan SK Penetapan Buku Induk Inventaris BMD 6 Cetak Buku Inventaris BMD 7 Cetak Buku KIB		Rp22.630.100													
TOTAL																			112.251.100

PR. KEPALA BADAN BPKPD,

NURSAL KHSAN, S.E., M.A.E.
 Pangkat : Pembina Tk.IV/b
 NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA

MULIANTI, SE
 Pangkat : Penata Tk.I, III/d
 NIP. 198301172010012003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUNG PURNAMA, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ARWIS, S.T.,M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,

ANDI ARWIS, S.T.,M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

AGUNG PURNAMA, S.Sos.
Pangkat : Penata
NIP. 19830823 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA
PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	3	4	5	6	7	8
1	1 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penyusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penyusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Januari s/d Desember	Rp32.056.400	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penyusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2	2 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp14.486.000	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
3	3 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp27.920.000	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
4	4 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Januari s/d Desember	Rp28.432.000	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
				Rp102.894.400		

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,



ANDI ARWIS, S.T., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

Benteng, 10 Januari 2025

KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BMD



AGUNG PURNAMA, S.Sos
Pangkat : Penata III/c
NIP. 198308232010011007

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BMD BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT	
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SPT	OKT	NOV	DES		
1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten	1 Membuat SK Bupati tentang Penyusunan Dokumen Dokumen Hasil Optimalisasi 2 Menyurati OPD guna mengusulkan barang yang akan dimusnahkan/dihapus. 3 Menyusun berita Acara penghapusan/dimusnahkan 3 Mengeluarkan pencatatan barang barang yang dihapus dari KIB	Rp32.056.400														
2	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Melakukan sinkronisasi belanja yang telah di belanjakan (Dicairkan) dengan rekening jenis belanja barang dan jasa pada Persediaan yang telah ditentukan . 2 Menyiapkan data bulanan pada awal bulan sesudahnya selama 1 tahun sebagai pendukung LKPD 3 Menyiapkan data semester setiap tahunnya	Rp14.486.000														

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SPT	OKT	NOV	DES	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 membuat Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah. 2 Pemeliharaan rutin berkala aset daerah bergerak dan tidak bergerak	Rp27.920.000													
4	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Penyusunan Dokumen Orang yang Mengikuti Pembinaan	1 Pembentukan Tim pelaksana kegiatan 2 Melaksanakan Rapat Internal Tim 3 Pelaksanaan Kegiatan	Rp28.432.000													
TOTAL																	
					102.894.400												

Benteng, 10 Januari 2025
KASUBBID PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BMD


AGUNG PURNAMA, S.Sos
 Pangkat : Penata III/c
 NIP. 198308232010011007

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,


ANDI ARWIS, S.T., M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19710405 200604 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI FARIDH ZAINAL, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pembinaan BMD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI ARWIS, S.T.,M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ANDI ARWIS, S.T.,M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. 19710405 200604 1 029

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,

ANDI FARIDH ZAINAL, S.E.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19730703 200701 1 037

PERJANJIAN KINERJA
KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMBINAAN BMD BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	3	4	5	6	7	8
1	1 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp87.096.800	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
	2 Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp469.503.700	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
	3 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Januari s/d Desember	Rp28.254.000	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Rp584.854.500		

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,



ANDI ARWIS, S.T., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

Bentang, 10 Januari 2025
KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMBINAAN BMD



ANDI FARIDH ZAINAL
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19730703200711037

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMBINAAN BMD BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2025

No	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 membuat SK Bupati tentang pembentukan Tim Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah 2 melakukan inventarisasi/ pencatatan terhadap database dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi : nama, jalan, panjang ruas jalan/tanah; 3 melakukan identifikasi kode lokasi 4 melakukan pengukuran riil lapangan terhadap panjang jalan dan lebar jalan; 5 membuat berita acara terhadap hasil lapangan;	Rp87.096.800													
2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 membuat Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pendataan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Menginventarisasi barang milik daerah yang akan dibaliknamakan kepemilikan 3 Melaksanakan koordinasi dengan BPN 4 Melakukan pengukuran untuk tanah yang sudah lama	Rp469.503.700													
3	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	1 membuat Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Membuat daftar BMD yang dikerjasamakan dengan pihak lain 3 Memverifikasi dokumen berupa pinjam pakai, sewa, ksp, kspi dan BGS/BSG 4 Menyusun laporan hasil pengawasan BMD	Rp28.254.000													
			TOTAL	584.854.500													

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,



ANDI ARWIS, S.T., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP. 19710405 200604 1 029

Benteng, 01 Januari 2025
KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMBINAAN BMD



ANDI FANDI ZAINAL
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP. 19730703200711037



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,

ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.

Pangkat : Pembina
NIP. 19760808 200604 1 024

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	MASUKAN	KELUARAN	HASIL
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp582.001.065	Dokumen	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
			2 Penyusunan Dokumen Target PAD			Dokumen	Tersusunnya target PAD
			3 Penyusunan Laporan Potensi Pajak Daerah			Laporan	Terkelolanya data dan Potensi Pajak Daerah
		2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Penyusunan Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah 2 Sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Januari s.d. Desember	Rp129.920.100	Dokumen Laporan Hasil Kegiatan	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Tersosialisasinya Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp40.000.000	Laporan	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			2 Jumlah kegiatan Pekan Panutan Pajak			Laporan hasil Kegiatan	Terlaksananya Pekan Panutan Pajak Kabupaten Kepulauan Selayar
			3 Jumlah Desa/kelurahan di 11 kecamatan yang dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB-P2			Laporan hasil Kegiatan	Terlaksananya kegiatan money PBB di 11 Kecamatan
		4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp100.000.000	Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

		2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi					Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak 2 Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWPD 3 Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Januari s.d. Desember	Rp152.000.000	Dokumen	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran Jumlah wajib Pajak yang memiliki NPWPD yang diolah dan didata Terlaksananya intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	
	6	Pengolahan, dan Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp80.000.000	Laporan	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1 Jumlah SPPT PBB-P2 yang tersalurkan 2 Jumlah PBB-P2 dan BPHTB baru yang diverifikasi 3 Jumlah piutang PBB-P2 yang diverifikasi	Januari s.d. Desember	Rp60.000.000	Dokumen SPPT-PBB Laporan laporan	Terlaksananya Penyaluran SPPT PBB-P2 Terlaksananya penelitian dan verifikasi berkas pendaftaran PBB-P2 Jumlah Piutang PBB-P2 yang diverifikasi	
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 2 Jumlah Perhitungan Penetapan untuk pendistribusian SKPD/SKRD	Januari s.d. Desember	Rp108.616.000	Dokumen Ketetapan Dokumen Perhitungan	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah tersedianya Dokumen perhitungan penetapan untuk penerbitan SKPD/SKRD	

		3 Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian Pengelolaan Benda-benda berharga/karcis retribusi				Kegiatan	Tersedianya benda berharga/karcis retribusi yang terperforasi
	9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 2 Jumlah dokumen pelayanan dan konsultasi yang dilaksanakan	Januari s.d. Desember	Rp50.000.000	Laporan Dokumen		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 2 Jumlah opd pengelola PAD yang direkonsiliasi dan dikonsolidasikan laporan pajak dan retribusinya	Januari s.d. Desember	Rp35.000.000	Dokumen Laporan hasil Rekonsiliasi		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Terlaksananya rekonsiliasi dan konsolidasi dengan OPD pengelola PAD
	11 Penagihan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak 2 Jumlah Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang didistribusikan kepada Wajib Pajak		Rp104.400.000	Dokumen SKPD piutang pajak Dokumen SPTPD		Terlaksananya Penagihan piutang Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib pajak
	12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Januari s.d. Desember	Rp50.000.000	Dokumen Surat Persetujuan/Pe notakan		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
	13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Januari s.d. Desember	Rp50.000.000	Dokumen LHP		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASRI ANSAR, S.E., M.M.**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

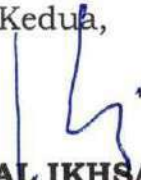
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19830525 200604 1 016

Pihak Pertama,


ASRI ANSAR, S.E., M.M.
Pangkat : Penata
NIP. 19800520 201503 1 003

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Penyusunan Laporan Potensi Pajak Daerah	Januari s.d Desember	Rp 582.001.065	Laporan	Laporan Potensi Pajak Daerah
			2 Penyusunan Dokumen Target Penerimaan Pajak Daerah			Dokumen	Dokumen Target Penerimaan Pajak Daerah
		5 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan/ sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	Januari s.d Desember	Rp 40.000.000	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah
		6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Melaksanakan maintenance/ pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi pengelolaan pajak daerah			Laporan	Laporan hasil Pemeliharaan Aplikasi
		7 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Dan Subyek Pajak	Januari s.d Desember	Rp 152.000.000	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Dan Subyek Pajak
		8 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Penyusunan Laporan Pengolahan, Pemeliharaan dan Basis Data Pajak Daerah			Laporan	Laporan Pengolahan, Pemeliharaan dan Basis Data Pajak Daerah

Benteng, 10 Januari 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

ASRI ANSAR, S.E., M.M.
Pangkat : Penata TK. I
NIP. 19800520 201503 1 003

PIR. KEPALA BADAN

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si
Pangkat : Pembina TK. I, IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN.	FEB.	MAR.	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES.	
1	Penyusunan Laporan Potensi dan Dokumen Target Pajak Daerah	1 Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan terkait penerimaan Pajak Daerah	Rp 582.001.065													
		2 Melakukan analisis potensi Pajak Daerah														
		3 Melakukan survey objek dan subjek pajak Pajak Daerah														
		4 Menyusun rencana penerimaan Pajak Daerah dan Target berdasarkan analisis potensi														
		5 Menyusun Laporan dan Dokumen data target penerimaan PAD														
2	Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan/ sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	1 Mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi	Rp 40.000.000													
		2 Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi														
		3 Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pajak daerah														
		4 Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan														
3	Melaksanakan maintenance/ pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi pengelolaan pajak daerah	1 Mengidentifikasi masalah dan melaporkannya kepada penyedia aplikasi untuk melakukan maintenance secara berkala	Rp 100.000.000													
		2 Konsultasi dan koordinasi dengan pihak penyedia Aplikasi														
		3 Melakukan upgrade sistem Aplikasi agar semakin optimal dalam penggunaannya														
4	Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Dan Subyek Pajak	1 Menyiapkan bahan terkait pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran obyek dan Subyek Pajak Daerah	Rp 152.000.000													
		2 Melakukan Konsultasi dan koordinasi dengan terkait pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak dengan pemerintah setempat														
		3 Melakukan Pendataan Wajib Pajak baru														
		4 Mengevaluasi pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Dan Subyek Pajak														
		5 Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan														
5	Penyusunan Laporan Pengolahan, Pemeliharaan dan Basis Data Pajak Daerah	1 Mengumpulkan data terkait basis data Pajak Daerah	Rp 80.000.000													
		2 Mengidentifikasi data pajak Daerah														



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASPA, S.Sos.**
Jabatan : Kasubid. Pengembangan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.
Pangkat : Pembina
NIP.19760808200604 1 024

Benteng, 10 Januari 2025

Pihak Pertama,

ASPA, S.Sos.
Pangkat : Penata
NIP. 19821228 200701 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	1 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Memberikan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 50.000.000	Laporan	Laporan Hasil pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah
	2 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2 Penyusunan Laporan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 35.000.000	Laporan	Laporan Hasil kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah
	3 Penagihan Pajak Daerah	3 Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah sesuai Dokumen SPTPD yang didistribusikan kepada Wajib Pajak	Januari s.d. Desember	Rp 104.400.000	Laporan	Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah
	4 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Memberikan Pelayanan terkait Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 50.000.000	Laporan	Laporan Hasil Pelayanan terkait Penyelesaian Keberatan Pajak

Benteng, 10 Januari 2025

**KASUBID. PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH**

ABDULWAHIDIN, SE.,M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19760808 200604 1 024

ASPA, S.Sos
Pangkat : Penata
NIP. 19821228 200701 1 004

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Memberikan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	1 Memberikan pelayanan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak	Rp 50.000.000													
		2 Mengidentifikasi setiap permasalahan yang disampaikan oleh Wajib Pajak														
		3 Menindaklanjuti laporan wajib pajak dengan memberikan solusi yang tepat														
		4 Menyusun Laporan dan mendokumentasikan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak														
2	Penyusunan Laporan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah	1 Mengumpulkan bahan terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan Verifikasi Subjek dan Obyek Pajak Daerah	Rp 35.000.000													
		2 Mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian														
		3 Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan terkait penelitian dan pelaporan Subjek dan Obyek Pajak Daerah														
3	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah sesuai Dokumen SPTPD yang didistribusikan kepada Wajib Pajak	1 Mengumpulkan data, membuat daftar dan menerima laporan dari Wajib Pajak (Self Assessment)	Rp 104.400.000													
		2 Melakukan verifikasi data yang disampaikan oleh wajib pajak														
		3 Melakukan penerbitan Dokumen SPTPD Pajak Daerah sesuai Laporan Wajib Pajak														
		4 Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kepada Wajib Pajak														
		5 Melakukan penagihan kepada Wajib Pajak sesuai dengan SKPD														
		6 Menyusun laporan hasil penagihan (Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah)														
4	Memberikan Pelayanan terkait Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Mengumpulkan Bahan terkait keberatan Pajak Daerah	Rp 50.000.000													
		2 Melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pokok materi yang diajukan oleh Wajib Pajak														



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD JUNAEDI, S.Sos.,M.M.**
Jabatan : Kasubid. Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

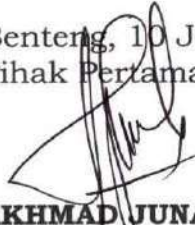
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan memberikan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ABDUL WAHIDIN, S.E.,M.M.
Pangkat : Pembina
NIP. 19760808 200604 1 024

Benteng, 10 Januari 2025
Pihak Pertama,


AKHMAD JUNAEDI, S.Sos.,M.M.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19800307 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	WAKTU PELAKSANAAN	ANGGARAN	KELUARAN	HASIL
1	1 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Penyusunan Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 50.000.000	Laporan	Laporan Hasil Penyusunan Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah	Januari s.d. Desember	Rp 381.791.719	Laporan	Laporan Hasil Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah

Benteng, 10 Januari 2025

KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

ABDUL WAHIDIN, SE.,M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19760808 200604 1 024

KASUBID. PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENDAPATAN DAERAH

AKHMAD JUNAEDI, S.Sos.,M.M
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19800307 200604 1 013

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
TAHUN 2025

NO.	INDIKATOR	AKTIVITAS	ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												BOBOT
				JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Penyusunan Laporan Pengendalian, Penerimaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Mengumpulkan bahan terkait pelaksanaan Pengendalian, Penerimaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 50.000.000													
		2 Melakukan uji petik pada Objek Pajak sebagai bentuk Pengawasan Pajak Daerah														
		3 Melakukan Pemeriksaan Pajak daerah pada Objek Pajak atau pada bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah														
		4 Menyusun Laporan dan mendokumentasikan kegiatan pengendalian dan pengawasan pajak daerah														
		5 Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikan LHP kepada wajib Pajak														
2	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola PAD terkait pembinaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 381.791.719													
		2 Memberikan Bimbingan Teknis kepada OPD Pengelola PAD terkait pembinaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah														
		3 Mengumpulkan bahan terkait pelaksanaan Pengawasan Retribusi Daerah														
		4 Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola PAD														
		5 Melakukan Pengawasan pada tempat/objek retribusi														
		6 Menyusun Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan melaporkan kepada pimpinan														

KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

ABDUL WAHIDIN, SE., M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19760408 200604 1 024

Bentang, 10 Januari 2025

KASUBID PENGENDALIAN DAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

AKHMAD JUNAEDI, S.Sos., M.M.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19800307 200604 1 013

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran. Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi capaian yang diperoleh pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Hasil pengukuran kinerja juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari upaya optimal seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dinilai melalui pengukuran pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktifitas sesuai dengan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
NO	URAIAN	NO	URAIAN	
1.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	1.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		1.2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,46%
2.	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	80%
3.	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	3.1	Nilai LAKIP perangkat daerah	BB
4.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset milik daerah	4.1	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai

Pada tahun anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang pemerintahan

daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dimana telah melaksanakan beberapa capaian kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukurnya dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	100%	WTP	-	-
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,69	2,03	35,68	3,46	21,11	371,00
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	Persen	75,00	78,38	104,51	85,00	-	-
4.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	B	62,15%	BB	-	-
5.	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Sesuai / Tidak Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%

Dari uraian tabel diatas tergambarkan bahwa dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU ke-5) yang capaian kinerjanya 100% yaitu Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU ke-2) yang capaian kinerjanya melebihi 100% yaitu pada capaian kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dibandingkan capaian kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 maka tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, (penjabaran lebih terinci pada penjelasan IKU ke-2).

Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-4) Nilai SAKIP OPD dan Indikator Kinerja Utama (IKU ke-1) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dijabarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) tahun anggaran 2026 hal tersebut disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 masih dilakukan audit oleh BPK-RI sementara Nilai SAKIP di reviu oleh Inspektorat Daerah pada awal tahun 2026 sehingga yang terjabarkan pada LAKIP tahun 2025 adalah nilai dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2024.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun anggaran 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Bupati dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun seluruh capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompokkan dan di analisa sebagai berikut:

- a. **Sasaran Strategis ke-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.**

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU 1)
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	100%	WTP	-	-

Berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan maka perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab negara. Lingkup Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Atas Tanggungjawab Keuangan Negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Entitas pemeriksa Laporan Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam kaitannya dengan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yakni menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mana merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (LKPD-OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun, kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 24 Maret 2026 oleh Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1. Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 49.A/LHP/XIX.MKS/06/2025 tanggal 3 Juni 2025, Hasil Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar tersebut maka target Sasaran Kinerja ke-2 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tercapai 100%.

Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah, penghitungannya dilakukan dengan memberikan poin pada masing-masing opini. Target point ditetapkan sebagai berikut :

Apabila mendapat opini “Tidak Wajar”, maka point yang diberikan adalah 1 (satu);

Apabila mendapat opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan adalah 2 (dua);

Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka point yang diberikan adalah 3 (tiga); dan

Apabila mendapat opini “ Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka point yang diberikan adalah 4 (empat).

Berdasarkan target point tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Target point} \times 100}{\text{Target Point opini}} = \text{Persentase Realisasi}$$

$$\frac{4 \text{ (empat)} \times 100}{4} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dapat dilakukan perhitungan capaian yaitu :

$$\frac{\text{Persentase Realisasi} \times 100}{\text{Persentase target}} = \text{Persentase capaian realisasi}$$

$$\frac{100\% \times 100}{100\%} = 100\%$$

1.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas yang mendukung pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dengan pendukung Capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku;
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
3. Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas LK-OPD-nya masing-masing.

1.3. Faktor Penghambat Keberhasilan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 menjelaskan bahwa masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Solusi (Rekomendasi)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk menindaklanjuti kelemahan yang ada dan juga berusaha meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

b. Sasaran Strategis ke-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU 2)
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,69	2,03	35,68	3,46	21,11	371,00

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1. Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 114.091.495.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.539.068.269,43 atau dengan persentase sebesar 86,37% atau terdapat selisih kurang sebesar Rp. 15.552.427.431,43 dengan persentase 13,63%.

Berdasarkan analisa perbandingan realisasi dengan target tersebut di atas, maka indikator pendapatan asli daerah tidak mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 86,37% dari persentase 100% yang ditargetkan di tahun 2025, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- tidak tercapainya sektor pajak daerah dengan persentase pencapaian sebesar 76,94% tidak terlampaui sebesar Rp. 5.522.416.379,53;
- tidak tercapainya sektor retribusi daerah pada retribusi jasa usaha dengan pencapaian sebesar 53,36% tidak terlampaui sebesar Rp. 996.319.060,00 dan retribusi jasa umum (Retribusi Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang) dengan realisasi persentase 0% dari target Rp. 18.000.000,00;
- tidak tercapainya sektor pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan persentase pencapaian sebesar 98,23% tidak terlampaui sebesar Rp. 226.635.204,00; dan
- tidak tercapainya sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan persentase pencapaian 39,21% tidak terlampaui sebesar Rp. 14.436.514.922,90.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		%
		TARGET	REALISASI	
PENDAPATAN ASLI DAERAH		114.091.495.700,00	98.539.068.269,43	86,37
1.	Pajak daerah	23.051.667.100,00	17.529.250.721,53	78,04
2.	Retribusi daerah	54.514.403.000,00	59.147.515.073,00	108,50
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	98,23
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	23.746.925.600,00	9.310.437.878,90	39,21

Sumber : LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025

1. Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 23.051.667.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.529.250.721,53 mencapai persentase 78,04%. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa realisasi pajak daerah yang tidak mencapai target diantaranya adalah pajak sarang burung walet mencapai 10,89%, pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 33,97%, opsen PKB mencapai 60,26%, pajak makan dan minum mencapai 70,90% dan opsen BBNKB mencapai 74,50%.

Akan tetapi terdapat penerimaan pajak yang melebihi target yaitu pajak reklame mencapai 100,65%, pajak air tanah mencapai 105,06%, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai 116,08%.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	Lebih/Kurang	%
I.	Pajak Daerah	23.051.667.100,00	17.529.250.721,53	(924.395.424,00)	76,04
1.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.050.000.000,00	1.218.813.107,00	168.813.107,00	116,08
2.	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	23.112.292,00	1.112.292,00	105,06
3.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.352.316.400,00	4.334.600.001,00	17.716.399,00	99,59
4.	PBJT Makanan dan Minuman	3.171.250.000,00	2.248.375.433,00	922.874.567,00	70,90
5.	PBJT Tenaga Listrik	4.200.000.000,00	4.077.103.820,00	122.896.180,00	97,07

6.	PBJT Jasa Perhotelan	250.000.000,00	224.130.711,00	25.869.289,00	89,65
7.	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	30.000.000,00	24.958.284,00	5.041.716,00	83,19
8.	PBJT Jasa Parkir	18.000.000,00	30.856.000,00	12.856.000,00	171,42
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.077.000.000,00	1.384.800.397,53	2.692.199.602,47	33,97
10.	Pajak Reklame	300.000.000,00	301.963.992,00	1.963.992,00	100,65
11.	Opsen BBNKB	2.105.955.390,00	1.569.014.653,00	536.940.737,00	74,50
12.	Opsen PKB	3.470.145.310,00	2.090.977.781,00	1.379.167.529,00	60,26
13.	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	544.250,00	4.455.750,00	10,89

Sumber : LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025

2. Hasil Retribusi Daerah

Target pendapatan dari sektor retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.54.514.403.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 59.147.515.073,00 atau mencapai 108,50% yang bersumber dari komponen retribusi daerah :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum mencapai 111,44% atau terlampaui dengan realisasi sebesar Rp 57.814.629.397,00 dari target sebesar Rp 51.878.059.000,00. Adapun komponen yang mempengaruhi tingginya realisasi tersebut

adalah penerimaan retribusi jasa umum yang melebihi target yaitu penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ditempat pelayanan kesehatan lainnya sebesar 112,17%, penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 101,40%, dan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar 99,24%.

2. Capaian Retribusi Jasa Usaha hanya mencapai 53,36% atau tidak terlampaui sebesar Rp 996.319.060,00 hanya terealisasi sebesar Rp 1.140.024.940,00 dari target sebesar Rp2.136.344.000,00. Adapun komponen yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah rendahnya retribusi pelayanan tempat khusus parkir, retribusi sewa alat berat, retribusi sewa transportasi laut/kapal, retribusi tempat penginapan/pasanggarahan/vila, retribusi pelayanan kepelabuhan, akan tetapi terdapat penerimaan retribusi yang melebihi target yaitu retribusi pemakaian laboratorium Dinas Kesehatan sebesar 110,97% dan retribusi tempat rekreasi sebesar 103,34%.
3. Capaian Retribusi Perizinan Tertentu hanya mencapai 38,57% tidak terlampaui sebesar Rp 307.139.264,00 atau

realisasi sebesar Rp 192.860.736,00 dari target sebesar Rp 500.000.000,00 Adapun komponen yang mempengaruhi capaian realisasi tersebut yaitu rendahnya capaian pada retribusi persetujuan bangunan gedung.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
HASIL RETRIBUSI DAERAH		54.514.403.000,00	59.147.515.073,00	108,50
	Retribusi Jasa Umum	51.878.059.000	57.814.629.397	115,32
	R. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	515.000.000,00	522.203.500,00	101,40
	R. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	360.500.000,00	106.600.000,00	29,57
	R. Pelayan Kesehatan	50.972.920.000	57.174.275.897,00	112,17
	R. Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang	18.000.000,00	0	0,00
	R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.639.000.00	11.550.000,00	99,24
	Retribusi Jasa Usaha			
	R. Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang	500.000.000,00	410.184.000,00	82,04
	R. Penyewaan Tanah	92.000.000,00	27.620.000,00	30,02
	R. Penyewaan Bangunan	90.000.000,00	86.600.000,00	96,22
	R. Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000.000,00	110.414.000,00	44,17

	R. Pemakaian Alat	50.000.000,00	50.834.000,00	103,34
	R. Pemakaian Kendaraan Bermotor	119.500.000,00	16.850.000,00	7,09
	R. Pemakaian Laboratorium	24.500.000,00	19.765.000,00	1,23
	R. Terminal	25.000.000,00	1.027.000	4,11
	R. Tempat Khusus Parkir	70.344.000,00	1.431.000	2,03
	R. Tempat Penginapan/ Pasanggarahan/Villa	265.000.000,00	21.330.000	8,05
	R. Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000,00	393.969.940	60,61
	Retribusi Perizinan Tertentu			
	R. Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000	192.860.736	38,57

Sumber LRA-PAD BPKPD per 31 Desember 2025

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada bagian laba (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD terealisasi sebesar Rp. 12.551.864.796,00 dari target sebesar Rp. 12.658.500.000,00 mencapai 99,16% dan tidak ada realisasi penerimaan pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Bidang Air Minum) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 120.000.000,00. Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Tahun 2025

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	98,23
	Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Pernyataan Modal Pada BUMD BPR (Lembaga Keuangan)	12.658.500.000,00	12.551.864.796,00	99,16
	Bagian Laba Yang Di Bagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) Atas Pernyataan Modal Pada BUMD BPR (Bidang Air Minum)	120.000.000,00	-	-

Sumber LRA-DPA BPKPD per 31 Desember 2025

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, realisasi penerimaannya hanya mencapai 39,21% atau sebesar Rp 9.310.437.678,90 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 23.746.925.600,00.

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2025

URAIAN		TARGET	REALISASI	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG SAH		23.746.925.600,00	9.310.437.678,90	39,21
	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	737.828.012,00	36,89
	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.257.167.200,00	1.271.003.901,53	17,51
	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain	14.489.758.400,00	7.301.605.765,37	50,39
	Pendapatan BLUD	0	0,00	0,00

Sumber Data : LRA_PAD BPKPD per 31 Desember 2025

2.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung peningkatan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan karakteristik dan potensinya adalah bersumber pada:

1. Investasi Pemerintah Daerah, dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Optimalisasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat meningkatkan nilai tambah pada penerimaan PAD;
3. Pengembangan sektor pariwisata, mengingat potensinya yang signifikan dalam mendorong laju pertumbuhan penerimaan PAD;

4. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah dan berdampak pada penerimaan PAD; dan
5. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang efisien termasuk optimalisasi belanja modal dan belanja operasi meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

2.3. Faktor penghambat keberhasilan

1. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah; dan
2. Koordinasi penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi antar SKPD juga masih rendah.

2.4. Solusi (Rekomendasi)

Berdasarkan beberapa penghambat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya untuk meningkatkan kinerja OPD serta BUMD dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan asli daerah dan perlu dilaksanakan sosialisasi yang intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah atas kewajibannya.

c. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Tabel 3.9.
Indikator Kinerja Utama (IKU 3)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan BPKPD	Persen	75,00	78,01	104,01	80,00	79,01	98,76

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat. Pada Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten melakukan pengukuran IKM terhadap berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, serta layanan administrasi keuangan daerah.

IKM memuat Sembilan unsur penting yaitu kesesuaian persyaratan layanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu

dalam memberikan layanan, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, kesesuaian produk pelayanan dengan standar pelayanan, kompetensi/kemampuan petugas, perilaku petugas terkait kesopaan dan keramahan, kualitas sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan pengguna layanan. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan table matriks dan grafis yang menggambarkan kecenderungan dari persepsi Masyarakat berdasarkan penyelenggaraan urusan setiap perangkat daerah dan secara kumulatif akan membentuk IKM Pemerintah Daerah untuk tahun yang bersangkutan.

3.1. Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2024

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap pengguna layanan pada tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan capaian yang **baik**, yang mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas terhadap kualitas layanan yang diberikan. Penilaian ini didasarkan pada beberapa unsur pelayanan, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Capaian IKM tersebut menunjukkan bahwa BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga didukung oleh komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.

Meskipun demikian, BPKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

Dengan adanya hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, dan mampu memenuhi harapan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung utama adalah pada keberhasilan IKM Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar adalah pada unsur kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan yang tidak membebankan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat.

3.3. Faktor Penghambat Keberhasilan

Hal yang yang menjai salah satu faktor penghambat keberhasilan dalam capaian Indeks Kepuasa Masyarakat (IKM) pada perangkat daerah adalah keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi dan lemahnya sistem pendukung

3.4. Faktor Penghambat Keberhasilan

Untuk menindaklanjuti hambatan-hambatan tersebut dibutuhkan optimalisasi SDM, digitalisasi dan penyederhanaan alur/metode, pembenahan fasilitas, penguatan sistem pengaduan serta komitmen pimpinan.

d. Sasaran Strategis ke-3 : Meningkatnya Nilai SAKIP OPD

Tabel 3.10.
Indikator Kinerja Utama (IKU 4)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP OPD	Persen	BB	B	62,15	BB	-	-

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen manajemen yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Implementasi SAKIP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan SAKIP melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Nilai SAKIP OPD menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel. Capaian nilai SAKIP tersebut mencerminkan tingkat keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan

program dan kegiatan, serta pencapaian hasil yang terukur. Selain itu, nilai SAKIP juga menggambarkan tingkat komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan peningkatan kualitas manajemen kinerja.

4.1. Analisa Perbandingan Realisasi terhadap Target Tahun 2024

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kepulauan Selayar, nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar atas Sistem Akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah 62,15 dengan predikat B (baik) dengan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja : 19,50
- b. Pengukuran Kinerja : 15,90
- c. Pelaporan Kinerja : 9,75
- d. Evaluasi Internal : 17,00

Dari akumulasi penilaian tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU 4) yaitu Nilai SAKIP OPD terealisasi B (62,15) yang berarti belum mencapai target IKU tahun

2024 sesuai dengan yang ditetapkan atau ditargetkan yakni BB atau Sangat Baik (Nilai 70-80). Akan tetapi dengan akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan sebagai informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, namun demikian masih memerlukan banyak perbaikan.

Oleh karena itu pada tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan melakukan perbaikan atau tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan tim Evaluasi Inspektorat Daerah, sehingga pada tahun 2026 bisa mendapatkan predikat minimal mencapai target atau melampau target.

4.2. Faktor Penghambat Keberhasilan

Masih terdapat beberapa hal yang belum dioptimalkan dengan maksimal yaitu dari segi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

4.3. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Rekomendasi

Berdasarkan faktor penghambat keberhasilan tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan atau tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan oleh tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain dari

sisi perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. Sasaran Strategis ke-2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah

Tabel 3.10.
Indikator Kinerja Utama (IKU 5)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persen	Sesuai	Sesuai	100	Sesuai	Sesuai	100

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pelaporan terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus

Kas dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan formula wajib yang digunakan sebagai acuan penyusunan LKPD.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah secara profesional, partisipatif dan akuntabel sebagai bagian atau satu kesatuan yang tak terpisahkan demi terwujudnya *Good Governance*. Yang terpenting juga dalam penyusunan laporan keuangan adalah memenuhi prinsip tepat waktu dan penyusunannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau dikenal juga dengan *System Analysis and Product in Data Processing* merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data yang digunakan Instansi Pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga penyajian data lebih akurat, efisien dan efektif maka capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU 5) telah sesuai dan mencapai target 100%.

C. Realisasi Keuangan

Total inputan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.153.730.100.295,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.709.008.851,00 atau 94,13%. Adapun uraian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.
Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Belanja Langsung	22.279.707.794,61	21.483.823.378,00	96,43
1.	Belanja Pegawai	5.508.204.061,61	5.068.403.436,00	98,04
2.	Belanja Barang dan Jasa	15.903.478.433,00	15.555.412.692,00	89,01
3.	Belanja Modal	868.025.300,00	860.007.250,00	95,68

Sumber : RFK Desember 2025 BPKPD

Dari uraian tabel 3.11. terinci Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 22.279.707.794,61 (*Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupah*) dialokasikan untuk mendanai 4

(empat) program yang tertuang di 13 (tiga belas) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah per Program

PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.404.919.311,00	13.957.837.366	96,90
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	136.273.851.900,00	127.988.133.031,00	93,92
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.365.300.200,00	1.347.980.025,00	98,73
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.686.028.884,00	1.415.058.429,00	83,93
JUMLAH TOTAL	153.730.100.295,00	144.709.008.851,00	94,13

Terlihat pada tabel 3.12 penyerapan terhadap pagu anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 per program adalah sebesar Rp. 144.709.008.851,00 atau 94,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025, penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terjabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025
Target	166.993.740.900,00	153.730.100.295,00
Realisasi	157.053.092.431,00	144.709.008.851,00
Persentase (%)	94.05%	94,13

Selanjutnya di uraikan realisasi target per program dan per kegiatan dan per sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025, pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Realisasi Target Anggaran per Program per Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA HASIL/ KELUARAN		%
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.404.919.311,61	13.957.837.366,00			
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117,000,000,00	114.854,395,00			
1	<i>Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,000,000.00	33,969,203.00	3 Dok	3 Dok	99,91

2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000.00	9,742,250.00	1 Dok	1 Dok	97,42
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,250,000.00	14,981,501.00	1 Dok	1 Dok	98,24
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10,000,000.00	9,625,216.00	1 Dok	1 Dok	96,25
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15,250,000.00	15,013,667.00	1 Dok	1 Dok	98,45
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	14,561,250.00	2 Lap	2 Lap	97.08
7	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,500,000.00	16,961,308.00	1 Lap	2 Lap	96,92
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.010.302.977,61	4.766.635.435,00			95,14

1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,922,302,977.61	4,683,092,212.00	52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	95,14
2	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,399,200.00	26,243,060.00	1 Dok	1 Dok	99,41
3	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,434,400.00	9,268,293.00	1 Dok	1 Dok	88,82
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000.00	12,700,895.00	1 Lap	1 Lap	84,67
5	<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	13,378,000.00	12,941,547.00	1 Dok	1 Dok	96,74
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22,788,400.00	22,389,428.00	1 Lap	1 Lap	98,25
C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000.00	59,933,000.00	120 Paket	120 Paket	99,89%
1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>					

	Indikator Kinerja : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60,000,000.00	59,933,000.00	120 Paket	120 Paket	99,89%
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,118,400,300,00	1,109,126.517,00			
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	484,283,300.00	480,591,600.00	16 Paket	16 Paket	99,24
	Indikator Kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
2	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	85,000,000.00	84,459,929.00	1 Paket	1 Paket	99,36
	Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					
3	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	22,500,000.00	21,264,500.00	1 Paket	1 Paket	94,51
	Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					
4	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	8,520,000.00	4,950,000.00	1 Dok	1 Dok	58,10
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					
5	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	119,997,000.00	119,835,000.00	1 Lap	1 Lap	99,86
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					
6	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	398,100,000.00	398,025,488.00	100 Lap	100 Lap	99,98
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
D	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.742.000,00	379.415.650,00			98,87
1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>					

	Indikator Kinerja : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	78,242,000.00	75,780,000.00	2 unit	2 unit	96,85
2	<i>Pengadaan Mebel</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20,000,000.00	19,702,500.00	10 Unit	10 Unit	98,51
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Indikator Kinerja : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	285,500,000.00	283,933,150.00	19 Unit	19 Unit	99,45
E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,701,124,388,00	6,544,397,673,00			97,66
1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,810,231,509.00	3,781,180,773.00	3 Lap	3 Lap hun	99,24
2	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,890,892,879.00	2,763,216,900.00	1 Lap	1 Lap	95,58
F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,014,349,645,00	983,474,696,00			96,96
1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	395,830,000.00	368,189,433.00	48 Unit	48 Unit	93,02
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,520,000.00	16,363,200.00	38 Unit	38 Unit	88,35
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

	Indikator Kinerja : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	599,999,645.00	598,922,063.00	1 Unit	1 Unit	99,82
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	136,273,851,900,00	127.988.133.031,00			93,92
A	Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	780,408,200,00	773,013,296,00			99,05
1	<i>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10,406,000.00	10,071,501.00	2 Dok	2 Dok	96,79
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	30,900,000.00	30,531,841.00	2 Dok	2 Dok	98,81
3	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	20,000,000.00	19,911,370.00	45 Dokumen	45 Dokumen	99,56
4	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	20,000,000.00	19,886,872.00	45 Dokumen	45 Dokumen	99,56
5	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	20,088,000.00	19,992,038.00	45 Dokumen	45 Dokumen	99,43
6	<i>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	20,938,000.00	20,167,891.00	45 Dokumen	45 Dokumen	99,52
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	201,788,200.00	200,513,638.00	3 Dok	3 Dok	99,37

	APBD					
8	<i>Verifikasi DPPA SKPD Tahun Anggaran 202 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	212,810,000.00	210,620,090.00	3 Dok	3 Dok	98,97
9	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	81,168,000.00	80,094,348.00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	87,08%
10	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	81,248,000.00	80,435,588.00	12 Dok	12 Dok	99,00
11	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	81,062,000.00	80,788,119.00	12 Dok	12 Dok	99,66
B	Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3,336,779,200,00	3,289,199,764,00			98.53
1	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	91,350,000.00	86,005,311.00	12 Dok	12 Dok	94.15
2	<i>Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3,857,400.00	3,262,608.00	1 Lap	1 Lap	84,58

3	<i>Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	54,451,800.00	50,879,509.00	2 Dok	2 Dok	93,44
4	<i>Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	40,000,000.00	37,171,360.00	1 Dok	1 Dok	92,93
5	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	45,000,000.00	43,610,339.00	12 Dok	12 Dok	96,91
6	<i>Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35,668,800.00	33,891,140.00	12 Dok	12 Dok	95,02
7	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	2,908,203,800.00	2,880,265,632.00	12 Laporan	12 Laporan	99,04

	Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
8	<i>Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	25,000,000.00	24,177,759.00	12 Dok	12 Dok	96,71
9	<i>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	72,242,300.00	69,891,608.00	2 Dok	2 Dok	96,75
10	<i>Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	61,005,100.00	60,044,498.00	50 Orang	50 Orang	98,43
C	Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	683,422,000,00	679,692,568,00			99,45

1	<i>Koordinasi Pelaksana Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	42,946,600.00	42,466,566.00	1 Lap	1 Lap	98,88
2	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	45.798.000,00	45.691.587	12 Dok	12 Dok	99,77
3	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	93.231.800,00	92.968.622,00	1 Lap	1 Lap	99,72
4	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	30.000.000,00	29.835.765,00	3 Lap	3 Lap	99,45
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	311.934.000,00	311.523.808,00	1 Dok	1 Dok	99,87

	Kabupaten/Kota					
6	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	14.560.000,00	14.340.587,00	1 Dok	1 Dok	98,49
7	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	24.420.800,00	23.877.790,00	5 Dok	5 Dok	97,78
8	<i>Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25.000.000,00	24.454.360,00	1 Dok	1 Dok	97,82
9	<i>Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	56.688.000,00	56.531.157,00	1 Dok	1 Dok	99,72
10	<i>Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	19.420.800,00	18.918.394,00	25 orang	25 Orang	97,41
11	<i>Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang	8.342.000,00	8.266.373,00	1 Lembaga	1 Lembaga	99,09

	Dibina					
12	<i>Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	11.080.000,00	10.817.559,00	1 Lap	1 Lap	97,63
D	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	131.473.242,500,00	123.246.227.403,00			93,74
1	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	125.087.314.000,00	118.290.375.625,00	1 Lap	1 Lap	94,57
2	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.330.000.000,00	1.427.219.190,00	1 Lap	1 Lap	61,25
3	<i>Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>					
	Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.055.928.500,00	3.528.632.588,00	1 Lap	1 Lap	87,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.365.300.200,00	1.347.980.025,00			98,71
A	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah					
1	<i>Penyusunan Standar Harga</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Standar Harga yang Disusun	83.319.000,00	82.356.643,00	1 Dok	1 Dok	98,84
2	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.980.000,00	11.945.813,00	45 Dok	45 Dok	99,71
3	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	27.920.000,00	27.331.522,00	1 Lap	1 Lap	97,89

4	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	703.664.800,00	700.690.516,00	1 Lap	1 Lap	99.58
5	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	430.309.900,00	421.147.554,00	1 Lap	1 Lap	97.87
6	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.728.000,00	43.962,552,00	1 Lap	1 Lap	96.14
7	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17.826.400,00	17,330,849,00	100 Dok	100 Dok	97.22
8	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14.486.000,00	14.456,776,00	4 Dok	4 Dok	99.80
9	<i>Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5.078.100,00	4.476.575,00	1 Lap	1 Lap	88.15
10	<i>Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	24.988.000,00	24.281.225,00	25 Dok	25 Dok	97.17
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.686.028.884,00	1.415.058.429,00			83,93

A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					
1	<i>Perencanaan pengelolaan pajak daerah</i>					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	521.835.065,00	468.842,214,00	12 Dok	12 Dok	89,84
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	129.920.100,00	121.026.583,00	2 Dok	2 Dok	93,15
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37.750.000,00	32.860.191,00	1 Lap	1 Lap	87,05
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	103.000.000,00	85.897.520,00	4 unit	4 Unit	83,40
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	133.896.000,00	131.432.173,00	20 Lap	20 Lap	98,16
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	61.789.000,00	60.538.493,00	1 Lap	1 Lap	97,98
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					
	Indikator Kinerja : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	67,738,000,00	66.088.609,00	20 Op	20 Op	97,57

8	Penetapan Wajib Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	78,316,000,00	73.858.458,00	1 Dok	1 Dok	98,31
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24.058.000,00	16.539.738,00	100 layanan	100 layanan	68,75
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	17.150,000,00	15.775.929,00	1 Dok	1 Dok	91,99
11	Penagihan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	108.050.000,00	102.856.517,00	1 Dok	1 Dok	95,19
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	19.862.000,00	18.442.406,00	1 Dok	1 Dok	92,85
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	26,214.000,00	19.711.855,00	1 Dok	1 Dok	75,20
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					
	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	356.450,719,00	201.187.743,00	1 Lap	1 Lap	56,44

Sumber RFK per 31 Desember 2025 dan DPA Perubahan 2025

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran masing-masing kegiatan per program rata-rata tercapai 94,13%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang hanya 98% dikarenakan efisiensi anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja;
2. Capaian indikator kinerja utama menunjukkan bahwa sebagian besar target yang ditetapkan dapat tercapai dengan tingkat realisasi yang baik. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didukung

oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta peningkatan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah;

4. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, penguatan sistem pemungutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
5. Meskipun secara umum capaian kinerja sudah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknis maupun administratif, yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat dikategorikan **baik**, namun tetap memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4.2. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun-tahun mendatang, beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah guna mendukung proses administrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

5. Meningkatkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan perpajakan dan retribusi daerah guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah.

4.3. Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi pada tahun berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dengan menyesuaikan indikator kinerja yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja;
3. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta peningkatan sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
5. Mengembangkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat serta memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Benteng, 10 Februari 2026

**Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah,**

NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19832505 200604 1 016

LAMPIRAN – LAMPIRAN